



RENCANA KERJA (RENJA) 2022



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jln. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086 Fax. 3584085 Hunting 3584077 Psw. 2710. 2712

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
NOMOR : 227/050/VII/2021

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022, maka perlu disusun Rencana kerja Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 77);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022;
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang 2005-2025, dengan memperhatikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun

2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. dan Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;

- KETIGA** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2022;
- KEEMPAT** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 23 Juli 2021

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



FX. BAMBANG SURANGGONO, S.Sos

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2022

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun pertama dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai sampai dengan saat ini. RENJA 2022 disusun berdasarkan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan pemulihan perekonomian daerah. Sehingga. tema pembangunan Kota Semarang pada tahun 2022 adalah “Pemantapan Pemulihan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Sistem Kesehatan menuju Masyarakat Sejahtera”.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan secara paralel. RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi. misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11). yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya. dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Renja adalah rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam renja PD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana Kerja (Renja) PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk menjalankan amanat tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2022, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2022 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Tahun 2021-2026, serta mendukung Visi dan Misi Walikota Semarang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
- j. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
- k. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E. Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5. Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- r. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas OPD.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang tahun 2022 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta sebagai pedoman dalam mencapai target Kinerja yang termuat dalam RPJMD Kota Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu tahun 2022.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022 sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2020

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2020. Analisa kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Review terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022. Serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Bab III berisi telaah terhadap kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta merumuskan tujuan dan

sasaran yang didasarkan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2022

Bab IV berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerjanya disertai pendanaan indikatif pada Tahun 2022.

Bab V PENUTUP

Bab V berisi penutup dari Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah. yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas. diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. serta mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2020 yang berpedoman pada Perubahan II Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Perubahan Kedua Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan 7 program dengan 44 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Adapun Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	CAPAIAN TAHUN 2019
Prosentase Koperasi Baik	88 %	88.72 %	100.82	88.67 %
Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	28 %	61.62 %	220.07	25.80 %

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah berhasil mencapai Persentase Koperasi Baik. dari yang ditargetkan 88% tercapai 88.72%. atau berhasil mencapai target 100.82%. dan Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya dari yang ditargetkan tahun 2020 yaitu 28% tercapai 61.62% . atau berhasil mencapai target 220.07 %.

Dengan meningkatnya persentase Koperasi baik dari aspek Kelembagaan. usaha. dan administrasi Keuangannya serta meningkatnya persentase jumlah UMKM yang meningkat nilai omsetnya diharapkan mampu mewujudkan koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan penyerapan tenaga Kerja.

Program inovatif yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian target tersebut adalah program pembiayaan Kredit Wibawa bagi Koperasi dan Usaha Mikro serta GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro lokal online Asli Semarang) yaitu Inovasi layanan pemasaran online dalam bentuk aplikasi katalog produk UMKM. Katalog produk ini meliputi produk Kuliner. craft. Fashion dan ekonomi kreatif. Adapun terkait pemberian perijinan bagi pelaku UMKM pada tahun 2020 sudah tidak menggunakan Sistem Ijus Melon tetapi melalui OSS (Online Single Submission) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Selain itu untuk lebih mengoptimalkan kinerja pada urusan Koperasi dan UMKM telah dibentuk “GERAI KOPI-MI” (Gerakan Ter-Integrasi koperasi dan Usaha mikro) sampai di Tingkat Kelurahan sebagai wadah untuk mengembangkan

dan memberdayakan Koperasi dan UMKM di Kota Semarang melalui 4P yaitu. pelatihan. Pendampingan. Permodalan dan Pemasaran.

Adapun Program yang mendukung pencapaian indikator diatas adalah :

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	58 %	30.12 %	51.93	59.68 %
2	Persentase Meningkatnya Kualitas produk yang dibina	14 %	7.37 %	52.64	14.53 %

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai adalah persentase Kualitas Usaha Mikro yang dibina dari yang ditargetkan 58% tercapai 30.12%. atau hanya berhasil mencapai target 51.93 %. Hal ini menurun dibandingkan capaian tahun 2019 yang sebesar 59.68 %. sedangkan Persentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 14 % tercapai 7.37 % atau hanya berhasil mencapai target sebesar 52.64 %. Hal ini menurun jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 14.53 %. Penurunan pencapaian target ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 sehingga dilakukan refocusing anggaran Pemerintah Kota Semarang yang diprioritaskan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Pandemi Covid 19 di kota Semarang sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan Perencanaan.

Adapun Kelembagaan UMKM di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2020 dapat dijelaskan pada data dibawah ini :

Tabel 2.3.
Capaian Kinerja Kelembagaan UMKM Kota Semarang Hingga Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Jumlah UMKM	Unit	17.567	17.913
2.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	17.546	17.892
3.	Jumlah UMKM yang dibina	Unit	2.857	2.822
4.	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	30.357	30.870
5.	Jumlah Omset	Rupiah	1.760.465.984.566	1.786.756.225.366
6.	Fasilitasi Permodalan UMKM	Rupiah	9.806.500.000	13.338.500.000

Dengan terlaksananya program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. diharapkan pelaku usaha mikro semakin meningkat produktifitas dan Kualitas produk serta Manajemen pengelolaan Usahanya sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasaran.

- 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi UMKM
Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Koperasi UMKM Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Legalitas Pelaku Usaha	40 %	7.05 %	17.63	54.50 %
2.	Persentase akses pembiayaan	35 %	79.67 %	227.63	80.14 %

Persentase Legalitas Pelaku usaha pada tahun 2020 yang ditargetkan 40% dapat tercapai 7.05%. atau hanya berhasil mencapai target 17.63 %. Penurunan capaian Persentase Legalitas Pelaku usaha pada tahun 2020 disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat pelaku usaha tentang pengurusan IUMK melalui OSS. Sedangkan fasilitasi akses pembiayaan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses permodalan melalui kredit wibawa yang pada tahun 2020 ditargetkan 35 % tercapai 79.67 % atau berhasil mencapai target sejumlah 227.63 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 80.14 % akibat banyaknya pelaku usaha yang terdampak Pandemi Covid 19 sehingga membutuhkan tambahan modal dalam mempertahankan usahanya.

Dari program yang dilaksanakan ini diharapkan masyarakat/pelaku usaha mampu memberdayakan diri dengan membuka usaha atau menjadi wirausaha baru karena mendapat kemudahan dalam mengakses berbagai fasilitas baik legalitas. permodalan. dan pendampingan dalam pengembangan usahanya serta mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Koperasi Aktif	88.5 %	88.72 %	100.25	88.67 %
2.	Persentase Koperasi Sehat	20 %	20.61 %	103.05	24.6 %
3.	Persentase Omset Koperasi	0.7 %	-25.66 %	-3.666	49.89 %

Pada Tahun 2020 Kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase koperasi aktif dari yang ditargetkan 88.5 % tercapai 88.72 % atau berhasil mencapai target sebesar 100.25 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 88.67 %. Persentase koperasi sehat dari target yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar 20 % tercapai 20.61 % atau berhasil mencapai target 103.05 %. Sedangkan target Persentase omset Koperasi tahun 2020 yaitu sebesar 0.7 % turun sebesar 25.66 %.

Penurunan Persentase Omset Koperasi disebabkan antara lain karena ada 8 Koperasi besar di Kota Semarang yang berpindah AD/ARTnya ke Provinsi Jateng. Namun dari jumlah koperasi ada peningkatan. karena berdirinya koperasi baru pada tahun 2020 sebanyak 11 Koperasi.

Adapun Kelembagaan Koperasi di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2020 dapat dijelaskan pada data dibawah ini.

Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Kelembagaan Koperasi di Kota Semarang sampai Tahun 2020

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	634	637
2.	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	715	718
3.	Persentase Koperasi Aktif	Persen	88.67	88.72
4.	Jumlah Omset Koperasi	Rupiah	1.878.627.483.000	1.396.573.432.000
5.	Jumlah Aset Koperasi	Rupiah	1.700.193.870.000	1.706.265.430.000
6.	Fasilitasi Permodalan Koperasi	Rupiah	1.500.000.000	2.050.000.000

Dengan tercapainya target tersebut diatas diharapkan pengelola Koperasi dapat lebih meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi

agar berfungsi lebih efektif dan mandiri. serta lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMK

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMK

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Akses Pemasaran	21 %	71.45 %	340.24	20.35 %

Pada Tahun 2020 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase akses Pemasaran dari yang ditargetkan 21 % tercapai 71.45 % atau berhasil mencapai target sejumlah 340.24 %.

Program inovatif yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian target tersebut adalah pemasaran produk-produk UMKM secara online melalui GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro lokal online Asli Semarang). yang pada tahun 2020 jumlah produk yang terfasilitasi melalui Sistem GULO ASEM kurang lebih sebanyak 600 produk Kuliner dan Kriya.

Selain itu fasilitasi akses pemasaran juga dilaksanakan dengan menyelenggarakan temu usaha dan Fasilitasi galeri di Kawasan Kota Lama. Gedung Balaikota. Pasar Bulu dan Pasar Sronдол serta melaksanakan Gelar Karya Produk Unggulan UMKM Gerai Kopimi di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Semarang Utara. Genuk. Tugu. Banyumanik. Gunungpati. Semarang Timur. Gajahmungkur. Pedurungan. dan gayamsari yang bekerjasama dengan BRI. Sukasari. Restomart nayati dan Bogasari guna membantu/menfasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid 19.

Dengan tercapainya program dan kegiatan ini para pelaku usaha mikro diharapkan akan memiliki jangkauan pemasaran produk unggulan

mereka ke wilayah yang lebih luas sehingga akan mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya serta meningkatkan omset para pelaku usaha mikro.

Secara lebih jelas, rekapitulasi evaluasi dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2.8.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang s/d Tahun 2020

No	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN KOPERASI DAN UKM									
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100% (60%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan listrik	12 bulan	12					12	100%
		Pembayaran rekening telepon dan listrik	100%	100% (60%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional	12 bulan	12					12	100%
		Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional	100%	100% (40%)	100% (60%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12					12	100%
		Penyediaan alat tulis kantor	100%	100% (40%)	100% (60%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100%

	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12					12	100%
		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	12 bulan	12					12	100%
		Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12					12	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	12					12	100%
		Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah daerah	12 bulan	12					12	100%
		Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	100%
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Pelaksanaan penugasan dinas kedalam daerah	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	100%
	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan lembur dll. bagi Administrasi Perkantoran	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	100%
	PROGRAM	Cakupan Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%

	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sarana dan Prasarana Aparatur		(40%)	(20%)	(20%)		(20%)	(80%)	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	5 unit	1	0	0	0%	0	0	0%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 unit	5					5	100%
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan gedung kantor	5 unit	5					5	100%
		Pengadaan Peralatan gedung kantor	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Pengadaan Mebeluer	Pengadaan mebeluer kantor	8 unit	8					8	100%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	30 unit	30					30	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	30 unit	30					30	100%
		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer	Pemeliharaan mebeluer kantor	8 unit	8					8	100%
	PROGRAM	Tertib pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%

	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	capaian kinerja dan keuangan		(40%)	(20%)	(20%)		(20%)	(80%)	
	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang	12 bulan	12				12	12	100%
		Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Penyusunan Lkjp Skpd	LKPJ SKPD	1 buku	1					1	100%
		LKPJ SKPD	4 dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
	Penyusunan Lakip	Lakip SKPD	1 buku	1					1	100%
		Lakip SKPD	4 dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 buku	1					1	100%
		Laporan keuangan akhir tahun	4 dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran	1 buku	1					1	100%
		Laporan keuangan semesteran	4 dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
	Penyusunan Renja Skpd	Renja SKPD	1 buku	1					1	100%
		Renja SKPD	4 dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
	Penyusunan Renstra Skpd	Renstra SKPD	1 buku	1					1	100%
		Renstra SKPD	1 dokumen	0	0	0	0	1	1	0%
	Penyusunan Rka Dan Dpa	RKA dan DPA, DPPA SKPD	3 buku	3					3	100%
		RKA dan DPA, DPPA SKPD	16 dokumen	8	4	4	100%	4	12	75%
	PROGRAM	Jumlah UMKM yang	3000	3.015					3015	100,5%

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	dibina	UMKM							
	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	60%	56,07%	55%	59,68 %	108,51%	58%	58%	96,67%
	Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	15%	14,49	13%	14,53%	14,49%	14%	14%	93,33%
Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Umkm	Jumlah UMKM yang dttingkatkan kewirausahaan dan ketrampilannya	360 Org	360					360	100%
Pengembangan Dan Pemberdayaan Umkm Melalui Inkubator Bisnis	Jumlah UMKM yang didampingi pengembangan usahanya	100 Org	100					100	100%
Peningkatan Manajemen Umkm	Jumlah UMKM yang ditingkatkan manajemen usahanya	480 Org	480					480	100%
Penguatan Mutu Produk Umkm	Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan produknya	100 Org	100					100	100%
Pendampingan Dan Peningkatan Usaha Umkm	Jumlah UMKM yang didampingi	225 Org	225					225	100%
Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	800 Org	610	200	30	15%	200	840	105%
Pendampingan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dalam mengembangkan usaha	800 Org	490	200	640	320%	200	1330	166,25%
Peningkatan Manajemen Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuan	670 Org	320	200	30	15%	200	550	82,08%

		manajerialnya								
	Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	550 Org	180	150	60	40%	150	390	70,9%
	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	2400 org	2970	600	265	44%	600	3835	159,79%
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Jumlah Masyarakat yang dilatih ketrampilan usaha	1580 orang	1650					1650	104,4%
		Jumlah Wirausaha Baru	806 orang	840					840	104,2%
		Prosentase Akses Pembiayaan	40%	79%	30%	80,14%	267,13%	35%	35%	87,5%
		Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	50%	78,25%	35%	54,5%	155,13%	40%	40%	80%
	Fasilitasi Akses Permodalan Kumkm	Jumlah KUMKM yg mendapat akses permodalan dari lembaga keuangan	50 KUMKM	50					50	100%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi legalitas pengembangan usahanya	1850 org	1540 org	350 org	801 org	228,8%	350	2691org	145,45%
	Peningkatan Dan Pemberdayaan Kumkm	Meningkatkan Dan Pemberdayaan Kumkm	3 keg	3					3	100%
	Peningkatan Kapasitas Pembina Kumkm	Peningkatan kapasitas pembina KUMKM dalam melaksanakan pembinaan	6 keg	4	1	0	0	1	5	83,33%
	Peningkatan Pengelolaan Usaha Kelompok Masyarakat	Meningkatkan Usaha Kelompok Masyarakat	96 klmpk	96					96	100%
	Pengembangan	Jumlah usaha mikro	6.412	7408					7408	115,53%

	Kelembagaan Kumkm	kecil yang terdata	UMKM							
	Pemanfaatan dan Pengembangan Usaha Kumkm	Jumlah KUMKM penerima bantuan dari pemerintah yang terpantau	600 KUMKM	690					690	115%
	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Masyarakat Dilingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	Jumlah Kelompok masyarakat yang difasilitasi pelatihan untuk menjadi wirausaha baru	960 org	1740					1740	181,25%
	Koordinasi dan Pengembangan Kumkm	Koordinasi pemberdayaan KUMKM dalam pengembangan data dan informasi	15 keg	6	3	0	0	3	9	60%
	Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan	1675 org	1498	425	257	60,47%	425	2180	130,14%
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Prosentase koperasi aktif	88,6%	88,41	88,4%	88,67%	100,31%	88,5%	88,5%	99,8%
Prosentase koperasi sehat		30%	8,89	12%	24,6%	205%	20%	20%	66,67%	
Prosentase Omset Koperasi		0,8%	2,39	0,6%	49,89%	8.315%	0,7%	0,7%	87,5%	
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian	1.500 Org	1740	350	400	114,28%	400	2540	169,33%
	Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi	Pengawas koperasi yang ditingkatkan manajemen pengawasan koperasi	250 org	150	50	170	340%	50	370	148%
	Pengembangan Usaha Koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha	500 Kop	350	100	75	75%	100	525	105%
	Peningkatan Pengendalian Koperasi	Koperasi yang diperiksa kelembagaan dan	1.075 Kop	475	300	384	128%	300	1159	107,81%

		usahanya								
	Fasilitasi Pemeringkatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperingkat	240 kop						240	100%
	Penilaian Kesehatan Koperasi	KSP/USP yang dinilai kesehatannya	1.450 Kop	880	300	535	178,33%	300	1715	118,27%
	Fasilitasi Hari Koperasi	Terselenggaranya peringatan hari koperasi beserta rangkaiannya	7.500 org	6000	1.500	2	0,13%	1.500	7502	100,02%
	Fasilitasi Kelembagaan Koperasi	Koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi	2.025 Kop	1275	400	450	112,5%	400	2125	104,93%
	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkoperasian	2.640 org	1870	540	420	77,77%	540	2830	107,19% %
	Advokasi Dan Pendampingan Koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitasi pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	545 kop	565	100	0	0%	100	665	122,01%
	Fasilitasi Perijinan Koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitasi perijinan koperasi	520 kop	430	120	100	83,33%	120	650	125%
	Fasilitasi Informasi Koperasi	Pengembangan data dan informasi koperasi	16 keg	8	4	7	175%	4	19	118,75%
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Koperasi yang ditingkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	400 kop	190	100	0	0%	100	290	72,5%
	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi yg mendapat pembinaan dalam penguatan dan perlindungan koperasi	600 kop	310	150	40	26,66%	150	500	83,33%
	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN	Prosentase koperasi aktif	78,5%	88,17					88,17%	88,17%

KOPERASI										
	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi sosialisasi perkoperasian	450 org	450					450	100%
	Fasilitasi Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang diberi pembinaan kelembagaan	500 kop	500					500	100%
	Advokasi Dan Pendampingan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran koperasi dan perijinan	115 kop	115					115	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN PRODUK UMKM	Jumlah UMKM yang dibina	1500 UMKM	1500 UMKM					1500	100%
	Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Umkm	Jumlah UMKM yang ditingkatkan kewirausahaan dan ketrampilannya	330 org	330					330	100%
	Peningkatan Manajemen Umkm	Jumlah UMKM yang ditingkatkan manajemen usahanya	300 org	360					360	100%
	Penguatan Mutu Produk Umkm	Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan %produknya	100 org	100					100	100%
	Peningkatan Pembinaan Produk Umkm Unggulan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	90 UMKM	90					90	100%
	PROGRAM PENINGKATAN	Meningkatnya jangkauan pemasaran	6 provinsi	6					6	100%

	DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM	produk unggulan daerah								
		Prosentase Akses Pemasaran	23%	24,5 %	20	20,35	101,75%	21	21	86,96%
	Pendampingan Dan Peningkatan Usaha Umkm	Jumlah UMKM yang didampingi	240 org	240					240	100%
	Peningkatan Akses Pemasaran Dan Promosi Produk Umkm	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	185 UMKM	185					185	100%
	Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan Umkm	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan jaringan dan kemitraan usaha	450 UMKM	300	100	80	80%	100	480	106,66%
	Peningkatan Promosi Produk Umkm Ke Luar Negeri	Produk Umkm yang mendapat fasilitasi promosi ke Luar Negeri	8 UMKM	8					8	100%
	Peningkatan Pembinaan Produk Umkm Unggulan Daerah	Produk Umkm Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	110 UMKM	110					110	100%
	Fasilitasi Promosi Produk Umkm	UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	1.200 UMKM	650	300	640	213,33%	300	1590	132,5%
	Perluasan Akses Pasar	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar	400 UMKM	260	100	0	0%	100	360	90%

Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2020. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2020 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9.
Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SISA ANGGARAN
	URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	12.039.131.119	11.416.875.450	94.83	622.255.669
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.463.761.119	7.061.668.284	94.61	402.092.835
	Belanja Pegawai	7.463.761.119	7.061.668.284	94.61	402.092.835
	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.106.784.869	2.828.623.284	91.05	278.161.585
	Tambahan Penghasilan ASN	4.356.976.250	4.233.045.000	97.16	123.931.250
	BELANJA LANGSUNG	4.575.370.000	4.355.207.166		220.162.834
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.025.041.000	945.073.989	92.20	79.967.011
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	72.000.000	47.875.989	66.49	24.124.011
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	9.000.000	7.262.250	80.69	1.737.750
010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	209.580.000	201.966.900	96.37	7.613.100
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.710.000	23.326.850	47.89	25.383.150
014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.406.000	14.748.000	84.73	2.658.000
015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	2.919.000	1.735.000	59.44	1.184.000
017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	453.100.000	435.833.100	96.19	17.266.900
018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	202.801.000	202.800.900	99.99	100
028	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	9.525.000	9.525.000	100	0
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	361.154.000	294.771.177	81.62	66.382.823
009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	99.864.000	99.863.500	99.99	500
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	223.930.000	158.940.667	70.978	64.989.333
026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.360.000	14.872.000	96.82	488.000
028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22.000.000	21.095.000	95.89	905.000
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	66.080.000	66.080.000	100	0
005	Penunjang Kinerja Pa. Ppk. Bendahara Dan Pembantu	64.130.000	64.130.000	100	0
006	Penyusunan Lkpj Skpd	500.000	500.000	100	0

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SISA ANGGARAN
010	Penyusunan Lakip	500.000	500.000	100	0
020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	500.000	500.000	100	0
028	Penyusunan Renja Skpd	450.000	450.000	100	0
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	452.060.000	415.288.000	91.87	36.772.000
021	Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro	11.803.000	11.803.000	100	0
022	Pendampingan Usaha Mikro	76.847.000	76.847.000	100	0
023	Peningkatan Manajemen Usaha Mikro	7.360.000	7.360.000	100	0
024	Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah	43.636.000	43.636.000	100	0
025	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	312.414.000	275.642.000	88.23	36.772.000
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM	499.156.000	498.552.000	99.88	604.000
014	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	161.085.000	161.085.000	100	0
029	Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	338.071.000	337.467.000	99.82	604.000
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	802.979.000	797.093.000	99.27	5.886.000
016	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	497.699.000	492.189.000	98.89	5.510.000
017	Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi	15.260.000	15.260000	100	15.258.474
018	Pengembangan Usaha Koperasi	19.588.000	19.587.500	99.99	500
019	Peningkatan Pengendalian Koperasi	15.330.000	15.330.000	100	0
021	Penilaian Kesehatan Koperasi	22.530.000	22.529.500	99.99	500
022	Fasilitasi Hari Koperasi	4.585.000	4.585.000	100	0
023	Fasilitasi Kelembagaan Koperasi	39.481.000	39.481.000	100	0
024	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	44.030.000	44.030.000	100	0
026	Advokasi Dan Pendampingan Koperasi	2.500.000	2.500.000	100	0
027	Fasilitasi Perijinan Koperasi	4.205.000	4.205.000	100	0
028	Fasilitasi Informasi Koperasi	131.651.000	131.276.000	99.72	375.000
030	Pengembangan. Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	6.120.000	6.120.000	100	0
21	Program Peningkatan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha Umkm	1.368.900.000	1.338.349.000	97.77	30.551.000
002	Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan Umkm	6.386.000	6.385.500	99.99	500
005	Fasilitasi Promosi Produk Umkm	1.359.941.000	1.329.391.000	97.75	30.550.000
006	Perluasan Akses Pasar	2.573.000	2.572.500	99.98	500

II.1.1 Sumber: Laporan LKPI Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2020

Dari data pada Tabel 2.9. tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Pada Tahun 2020. aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan. 7 program dan 39 kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Semarang adalah sebesar Rp 12.039.131.119.- . Dari anggaran tersebut.

realisasinya adalah sebesar Rp 11.416.875.450.- (94.83%) dengan sisa Anggaran sebesar 622.255.669.- (5.17 %). dengan rincian sebagai berikut:

a. **Belanja Tidak Langsung.** anggaran sebesar Rp 7.463.761.119.- dengan realisasi sebesar Rp 7.061.668.284.- (94.61%) dan sisa anggaran sebesar Rp 402.092.835.- (5.39 %).

Sisa anggaran Belanja Tidak Langsung disebabkan oleh pembayaran tunjangan pegawai bulan Desember 2020 dibayarkan pada bulan Januari 2021.

b. **Belanja Langsung.** anggaran sebesar Rp 4.575.370.000.- dengan realisasi sebesar Rp 4.355.207.166.- (95.19%) dan sisa anggaran sebesar Rp 220.162.834.- (4.81 %).

Sisa anggaran Belanja Langsung umumnya dikarenakan efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan. serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah tumbuhnya koperasi yang aktif dan sehat serta pelaku usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing.

Hal itu berusaha diwujudkan dengan upaya meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM pengelola Koperasi yang kompetitif. Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan berbasis koperasi serta peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro di kota semarang melalui pelayanan 4P yaitu Pendampingan. Pelatihan. Pemasaran dan pembiayaan guna menumbuhkan produktivitas UKM.

Pada Perubahan II Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 2016-2021 terdapat 10 (sepuluh) pelayanan program kerja dinas, yaitu :

Tabel 2.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyek si Th 2021	Catatan Analisis
				Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2018	Th 2019	Th 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
1	Prosentase Koperasi Baik	-	-	88%	88%	88%	88%	88.41 %	88.67 %	88.72%	88%	Sangat tinggi
2	Prosentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkatkan omsetnya	-	-	23%	25%	28%	32%	25.7%	25.80 %	61.62%	32%	Sangat tinggi
3	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	-	-	53%	55%	58%	60%	56.07 %	59.68 %	30.12%	60%	rendah
4	Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	-	-	12%	13%	14%	15%	14.49 %	14.53 %	7.37%	15%	rendah
5	Prosentase Akses Pembiayaan	-	-	25%	30%	35%	40%	79.0%	54.50 %	79.67%	40%	Sangat tinggi
6	Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	-	-	30%	35%	40%	50%	78.25 %	80.14 %	7.05%	50%	Sangat rendah
7	Prosentase koperasi aktif	-	-	88.3%	88.4%	88.5%	88.6%	88.41 %	88.67 %	88.72%	88.6%	Sangat tinggi
8	Prosentase koperasi sehat	-	-	6%	12%	20%	30%	8.89%	24.6 %	20.61%	30%	Sangat tinggi
9	Prosentase Omset Koperasi	-	-	0.5%	0.6%	0.7%	0.8%	2.39%	49.89 %	-25.66%	0.8%	Sangat rendah
10	Prosentase Akses Pemasaran	-	-	18.5%	20%	21%	23%	24.5%	20.35 %	71.45%	23%	Sangat tinggi

*) Sangat Tinggi $X > 90$; Tinggi $90 \geq X > 75$; Sedang $75 \geq X > 65$; Rendah $65 \geq X > 50$; Sangat Rendah $X \leq 50$

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu dinas yang melaksanakan Urusan Wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah maka perlu adanya sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan propinsi dan kementerian dalam bentuk pembinaan kepada Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan prosentase koperasi aktif. meningkatkan omset pelaku usaha dan jiwa kewirausahaan serta memberikan pelatihan kepada pelaku usaha produk unggulan daerah *one village one product* (OVOP).

Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi selaras dengan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya UMKM yang mandiri tangguh dan mandiri. serta menjadi salah satu pemicu dan

pemacu bergerakinya roda perekonomian daerah. Seiring dengan semakin derasnya dinamika globalisasi dan pasar bebas maka Koperasi dan Usaha Mikro yang tangguh, kuat dan mandiri merupakan prasyarat wajib dalam menghadapi kondisi tersebut.

Selain itu masih perlunya pengembangan produk unggulan daerah berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, terutama untuk menjaga potensi resesi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, serta dampaknya terhadap sektor formal dan informal. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu : belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasi dan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam kegiatan ekspor produknya; dan perlunya Optimalisasi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN), terdapat perubahan pada pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 yang mempunyai visi “**Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera**” telah diupayakan agar selaras dengan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

- Masih lemahnya peran Koperasi dan usaha mikro Kota Semarang dalam mendorong Pertumbuhan Omset dan tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang.
 - Jangkauan Pemasaran produk KUMKM masih terbatas.
 - Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro dalam menghadapi Perkembangan Tehnologi Informasi.
 - Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro yang belum optimal
 - Kurangnya pemahaman Pelaku usaha Mikro terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga Keuangan Perbankan/non Bank.
 - Masih lemahnya kapasitas kelembagaan Koperasi di Kota Semarang
 - Masih banyaknya Koperasi di Kota Semarang yang belum mematuhi Regulasi Perkoperasian
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Visi pembangunan daerah sebagaimana Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”**. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai kota metropolitan dengan Sumber Daya Manusia unggul, produktif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu :

- Misi 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
- Misi 2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
- Misi 3. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota

Misi 4. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan

Misi 5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia



Gambar 2.1.
Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2021-2026

Makna dari visi tersebut adalah Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya. Terbukti bahwa Kota metropolitan ini telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, menuntaskan rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa lima tahun ke depan akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan

lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Definisi SEMAKIN HEBAT dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut melalui semangat seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota ingin menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain berpedoman pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026 yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, perencanaan pembangunan tahun 2022 juga disusun dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43).

Berdasarkan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian Misi Ke 2 yaitu **Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila** sehingga berdampak pada program pengentasan kemiskinan dan pengurangan Pengangguran di Kota Semarang agar target laju pertumbuhan ekonomi di kota semarang pada tahun 2022 dapat terealisasi dengan indikator sasaran Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan Perdagangan dan jasa terhadap PDRB.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang menghadapi tantangan antara lain :

- a) Meningkatkan kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan teknologi Informasi
- b) Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola Koperasi untuk selalu mengikuti perubahan dan perkembangan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan koperasi dengan memberikan pelatihan, sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar berfungsi efektif dan mandiri, serta lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Meningkatkan Jangkauan pemasaran produk KUMKM yang lebih luas.
- d) Meningkatkan pemahaman pelaku KUMKM terhadap aturan mengakses permodalan.
- e) Meningkatkan produktifitas Usaha yang dilakukan pelaku usaha Mikro sehingga tidak bersifat /berskala rumah tangga saja

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a) Komitmen dan dukungan keberpihakan Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi dan UMKM.
- b) Sumber daya alam potensi lokal yang beragam.
- c) Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang banyak di Kota Semarang
- d) Tehnologi informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas.

5. Formulasi isu-isu penting (rekomendasi dan catatan strategis) yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 :

- a) Daya saing ekonomi diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan kunjungan wisatawan melalui mengembangkan destinasi wisata dan seni

budaya lokal. **pengembangan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UKM melalui akses permodalan** dan pengembangan IKM.

Rekomendasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang :

1. Dalam rangka penguatan daya saing ekonomi daerah maka perlu direncanakan kegiatan guna meningkatkan produksi Usaha mikro melalui peningkatan nilai tambah diversifikasi produk. memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga non Perbankan. peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi serta kemitraan KUMKM dengan pengusaha besar.
2. Perlu dibangun sistem data yang valid terkait jumlah Koperasi dan pelaku usaha mikro di kota semarang sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Semarang
3. Daya saing ekonomi. dan peningkatan kesempatan berusaha diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan jaringan distribusi produk. peningkatan sarana dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro terutama yang terdampak oleh COVID-19. peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal. pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan. branding serta pemasaran produk. juga mendorong ekspor produk UMKM agar mampu bersaing dipasar internasional.
4. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2022
Prioritas Daerah tahun 2021 adalah Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. dijabarkan pada Fokus 4 yaitu Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil. melalui upaya:
 - Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat mengakses permodalan;
 - Peningkatan event untuk pemasaran produk usaha mikro dan kecil.
 - Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah.
 - Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - Sinergitas UMKM dengan Koperasi.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD Kota Semarang Tahun 2022

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kota Semarang Tahun 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 maka perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Walikota yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maka program dan kegiatan yang masih mendukung pencapaian sasaran dan indikator yang terdapat di RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026 serta indikator program dan kegiatan yang terdapat Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021-2026 digunakan untuk mencapai target indikator tersebut.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11.
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 KOTA SEMARANG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Catatan Penting	HASIL AKHIR KEBUTUHAN	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				18.842.180.000				25.758.867.000
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		3%	50.000.000	APBD Kota Semarang		3%	201.129.570
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan izin usaha simpan pinjam		15 kop	25.000.000	APBD Kota Semarang		15 kop	79.929.210
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan izin usaha simpan pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	25 kop	25.000.000	APBD Kota Semarang		25 kop	79.929.210
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan izin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		2 kop	25.000.000	APBD Kota Semarang		2 kop	121.200.360
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	25 kop	25.000.000	APBD Kota Semarang		25 kop	121.200.360
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk		50%	150.000.000	APBD Kota Semarang		50%	331.331.270

			koperasi						
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	Kota Semarang	100 kop	150.000.000	APBD Kota Semarang	100 kop	331.331.270
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	150 kop	75.000.000	APBD Kota Semarang	150 kop	237.569.460
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	Kota Semarang	150 kop	75.000.000	APBD Kota Semarang	120 kop	93.761.810
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	Kota Semarang	30%	75.000.000	APBD Kota Semarang	30%	152.753.490
		Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	Kota Semarang	66.00%	50.000.000	APBD Kota Semarang	66.00%	152.753.490
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	300 Kop	50.000.000	APBD Kota Semarang	200 Kop	152.753.490
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	10%	245.000.000	APBD Kota Semarang	10%	774.094.650
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan		1%			1%	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	Kota Semarang	70%	145.000.000	APBD Kota Semarang	70%	300.685.660
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM/ anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	80 org	145.000.000	APBD Kota Semarang	80 org	300.685.660
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan	Kota Semarang	70%	100.000.000	APBD Kota Semarang	70%	473.409.000

			Ketrampilan							
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	150 org	100.000.000	APBD Kota Semarang		360 org	473.409.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	Kota Semarang	25%	290.000.000	APBD Kota Semarang		25%	1.954.100.700
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	Kota Semarang	50%	290.000.000	APBD Kota Semarang		50%	1.954.100.700
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	25 kop	290.000.000	APBD Kota Semarang		340 kop	1.954.100.700
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	25 kop		APBD Kota Semarang		500 kop	
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	25 kop		APBD Kota Semarang		120 kop	
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 kop		APBD Kota Semarang		164 kop	
			Jumlah laporan updating data Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 lap		APBD Kota Semarang		12 lap	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat	Kota Semarang	3%	2.724.565.000	APBD Kota Semarang		3%	6.082.362.060

	(UMKM)	Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan							
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	Kota Semarang	600 org	2.724.565.000	APBD Kota Semarang		600 org	6.082.362.060
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 org	250.000.000	APBD Kota Semarang		500 org	251.200.000
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 org	600.000.000	APBD Kota Semarang		100 org	296.290.760
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	200 org	1.665.000.000	APBD Kota Semarang		1.250 org	4.951.012.700
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	200 org	209.565.000	APBD Kota Semarang		500 org	583.858.600
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	Kota Semarang	20%	2.467.069.000	APBD Kota Semarang		20%	4.841.947.600
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	Kota Semarang	100 org	2.467.069.000	APBD Kota Semarang		100 org	4.841.947.600
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	500 org	2.467.069.000	APBD Kota Semarang		500 org	4.841.947.600
		Pengembangan Co Working Space	Dinas Koperasi dan	1 paket				1 paket	

				Usaha Mikro						
		NON URUSAN								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 %	12.865.546.000	APBD Kota Semarang		100%	11.421.147.660
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	Kota Semarang	100%				100%	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%				100%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kota Semarang	9 dok	1.000.000	APBD Kota Semarang		9 dok	11.820.032
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 dok	1.000.000	APBD Kota Semarang		2 dok	734.006
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1.000.000	APBD Kota Semarang		1 dok	3.220.880
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1.000.000	APBD Kota Semarang		1 dok	3.759.262
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1.000.000	APBD Kota Semarang		1 dok	1.680.262
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1.000.000	APBD Kota Semarang		1 dok	1.212.662
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 dok	1.000.000	APBD Kota Semarang		3 dok	1.212.662

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%	11.367.546.000			100%	9.562.121.760
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	3 dok				3 dok	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	11.367.546.000	APBD Kota Semarang		100%	9.309.257.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	250.000.000	APBD Kota Semarang		100%	251.640.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1.000.000	APBD Kota Semarang		1 dok	559.716
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 dok	1.000.000	APBD Kota Semarang		2 dok	665.048
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Semarang	100%	680.000.000	APBD Kota Semarang		100%	1.132.106.507
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 jenis	50.000.000	APBD Kota Semarang		3 jenis	130.942.330
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 jenis	25.000.000	APBD Kota Semarang		5 jenis	29.166.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	35 jenis	75.000.000	APBD Kota Semarang		35 jenis	79.636.840
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	8 jenis	25.000.000	APBD Kota Semarang		8 jenis	29.533.337
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah bahan bacaan	Dinas	2 jenis	5.000.000	APBD		2 jenis	1.920.000

		Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundangan yang disediakan	Koperasi dan Usaha Mikro			Kota Semarang			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 org	50.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	81.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 keg	250.000.000	APBD Kota Semarang		100 keg	442.410.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 jenis	200.000.000	APBD Kota Semarang		5 jenis	337.498.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100%	50.000.000	APBD Kota Semarang		100%	244.949.010
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 jenis	25.000.000	APBD Kota Semarang		3 jenis	108.913.710
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 jenis	25.000.000	APBD Kota Semarang		2 jenis	136.035.300
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kanto	Kota Semarang	100%	125.000.000	APBD Kota Semarang		100%	116.640.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	125.000.000	APBD Kota Semarang		100%	116.640.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	Kota Semarang	100%	385.000.000	APBD Kota Semarang		100%	353.510.347
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 unit	40.000.000	APBD Kota Semarang		1 unit	36.318.180
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Dinas Koperasi	25 unit	260.000.000	APBD Kota		25 unit	226.772.550

		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan Usaha Mikro			Semarang			
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 jenis	10.000.000	APBD Kota Semarang		2 jenis	2.181.600
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 jenis	75.000.000	APBD Kota Semarang		5 jenis	88.238.017

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang merupakan hasil dari usulan-usulan Musrenbang Kecamatan. Usulan-usulan tersebut diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Koperasi dan usaha Mikro setelah melalui sinkronisasi kesesuaian dengan Tupoksi dan kewenangan Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang serta sasaran dan target yang akan dicapai Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang di tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Dalam urusan bidang koperasi dan usaha mikro. Kecil dan menengah jumlah usulan dari Kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan anggaran. Sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas sehingga untuk mengakomodir usulan-usulan tersebut Dinas koperasi dan Usaha Mikro melakukan verifikasi dengan menetapkan skala prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas kegiatan pembangunan daerah di kota Semarang khususnya urusan bidang koperasi dan usaha mikro. kecil dan menengah tahun 2022 yaitu antara lain yang mendukung kampung Tematik serta Program Gerai Kopimi.

Adapun hasil usulan dari musrenbang Kecamatan yang diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12.
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Usulan	Besaran / Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01 TAMBAKHARJO	Pelatihan Aneka Olahan Singkong	25 Orang	
2.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01	Pelatihan Pembuatan Sabun Home Industri	25 Orang	

		TAMBAKHARJO			
3.		Balai Kelurahan RT 06 RW 01 KARANGTURI	Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	
4.		Jalan Kumpul R Soekanto RT 02 RW 02 MANGUNHARJO	Pelatihan Pembuatan Kue Kering	30 Orang	
5.		Jl Klipang Raya RT 01 RW 01 (Kelurahan) RT 01 RW 01 SENDANGMULYO	Pelatihan manajemen bisnis, keuangan dan pemasaran	30 Orang	
6.		Jl Klipang Raya RT 01 RW 01 (Kelurahan) RT 01 RW 01 SENDANGMULYO	Pelatihan pembuatan makanan ringan	50 Orang	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
7.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01 TAMBAKHARJO	Sosialisasi Pengurusan Ijin I-PRT	25 Orang	
8.		Jl Klipang Raya RT 01 RW 01 (Kelurahan) RT 01 RW 01 SENDANGMULYO	Pendampingan perijinan untuk usaha seperti Halal, Haki, BPOM	50 orang	
9.		BALAI KEL WONOSARI RT 01 RW 08 WONOSARI	Pelatihan sulam pita	1 Kegiatan	
10.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01 TAMBAKHARJO	Sosialisasi Kredit Wibawa dan BPJS-TK	25 Orang	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
11.	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengelohan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01 TAMBAKHARJO	Bazar/Gelar Produk UMKM Tambakharjo	25 Orang	
12.		Jl Klipang Raya RT 01 RW 01 (Kelurahan) RT 01 RW 01 SENDANGMULYO	Pelatihan packaging produk	30 Orang	
13.		Balai Kelurahan Salaman Mloyo RT 03 RW 02 SALAMANMULYO	Pelatihan Desain Kemasan Produk yang Menjual	40 Peserta	

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,2 – 6,0%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5 – 6,3 %
3. Rasio Gini nilai 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,41 – 73,46
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26,87
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 102 – 104
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 102 – 105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

3.2 Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022

Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah dalam rangka pencapaian isi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” sebagaimana RPJMD 2018-2023. Tema Pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 adalah “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”. Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana yang difokuskan pada :
 - a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi melalui :
 - 1) Produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan petani
 - 3) Eco Sosio Tourism
 - b. Penguatan keberlanjutan lingkungan hidup, melalui :
 - 1) Rehabilitasi DAS kritis
 - 2) Potensi sumber daya hutan kayu dan non-kayu
 - 3) konservasi lingkungan, pengendalian pencemaran
 - c. Pemantapan ketahanan bencana, melalui :
 - 1) Penanggulangan banjir, rob, dan tanah longsor

- 2) Integrasi perencanaan kebencanaan dengan pembangunan
 - 3) Penguatan system peringatan dini dan kesiapsiagaan
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, melalui :
- 1) Basic Life access
 - 2) Sustainable Livelihood
 - 3) Tata Kelola Kelembagaan
 - 4) Perbaikan Kualitas, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan Tenaga Kerja
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing, melalui :
- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan
 - 2) Pembangunan Kesehatan melalui pemerataan tenaga kesehatan, fasilitasi pelayanan kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan digitalisasi pelayanan kesehatan
 - 3) Peningkatan Akses Pelayanan Dasar, Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, melalui :
- 1) Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat
 - 2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan
 - 3) Peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur
 - 4) Penguatan kapasitas fiskal daerah
 - 5) Keberagaman, toleransi dan spiritualisme
 - 6) Keamanan dan Ketertiban masyarakat

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 diarahkan pada :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,96 – 5,88%.

3.3 Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2022

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, perkiraan capaian di tahun 2021 serta isu-isu strategis di tahun 2022.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 adalah “Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal;
- Prioritas Daerah 2. Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif;
- Prioritas Daerah 3. Pemenuhan Hak Dasar serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran Yang Berkeadilan;
- Prioritas Daerah 4. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2022 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya, sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi Lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah
 - 2) Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - 3) Fasilitasi kewirausahaan baru berbasis nilai tambah
 - 4) Fasilitasi legalitas dan pengembangan produk unggulan UMKM/IKM

- 5) Fasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM/IKM
 - 6) Fasilitasi kegiatan pemasaran produk-produk lokal
 - 7) Fasilitasi peningkatan nilai dan produk ekspor
- b. Fasilitasi Sarana Prasarana Untuk Berusaha, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 2) Fasilitasi penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - c. Peningkatan investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pemantapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Online Single Submission (OSS) berbasis pendekatan risiko
 - 2) Pelaksanaan promosi investasi
 - d. Peningkatan Kunjungan Wisatawan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan Destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - e. Penguatan ketahanan pangan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pemenuhan cadangan pangan
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan Sarana Prasarana Perikanan
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan Sarana Prasarana Pertanian berbasis perkotaan
2. Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan Kualitas Dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi, melalui upaya-upaya antara lain :
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM pendidikan yang berbasis pada dukungan pengembangan teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan agama dan akhlak mulia berwawasan daerah dan kebangsaan

- 5) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 6) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 7) Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan
 - 8) Pengembangan literasi dan arsip digital
- b. Peningkatan Partisipasi, Kesempatan Belajar, Dan Keberlanjutan Pendidikan Untuk Semua, melalui upaya-upaya:
- 1) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 2) Peningkatan pemberian beasiswa bagi warga miskin dan siswa berprestasi
 - 3) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - 4) Fasilitasi penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan upaya pencegahan pandemi
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 2) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 3) Percepatan penyelesaian upaya penanggulangan Pandemi
 - 4) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 2) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - 3) Pemberdayaan Lansia
 - 4) Fasilitasi kebutuhan disabilitas

- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Penguatan pendidikan calon pengantin
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Fasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
- 3. Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran Yang Berkeadilan, dengan fokus:
 - a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - 2) Verifikasi dan validasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 3) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 4) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 5) Peningkatan lapangan pekerjaan bagi warga miskin
 - 6) Pemenuhan kesempatan pekerjaan bagi pengangguran usia produktif
 - 7) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 8) Fasilitasi upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - b. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Fasilitasi sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Penguatan sistem dan database perlindungan sosial
 - 3) Peningkatan kualitas Data terpadu Kesejahteraan Sosial
 - 4) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - c. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
 - 3) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak pandemi khususnya masyarakat rentan

- d. Penguatan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras, dan latar belakang lainnya, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan kesadaran bela negara, kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan
 - 2) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 3) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas Yang Inklusif Dan Berwawasan Lingkungan Untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, dengan fokus:
- a. Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur (Land Banking)
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga sesuai standar dan representatif
 - 3) Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu
 - 4) Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi
 - 5) Pengembangan pengelolaan infrastruktur berbasis teknologi informasi
 - b. Pengembangan kawasan strategis kota, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan kawasan strategis heritage
 - 2) Pengembangan kawasan pesisir
 - 3) Pengembangan kawasan dan infrastruktur penunjang pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan dan infrastruktur penunjang ekonomi
 - 5) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pembangunan outer, middle dan inner ring road
 - 2) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota

- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terinterasi
 - 2) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 3) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan
- e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1. Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3. Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4. Pemenuhan lahan permakaman umum
- f. Pengendalian kualitas Lingkungan Hidup, melalui upaya-upaya:
 - 1. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur
 - 2. Pengembangan dan peningkatan fungsi ruang terbuka hijau
- g. Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian banjir, melalui upaya-upaya:
 - 1. Peningkatan pemeliharaan sistem drainase pengendalian banjir
 - 2. Peningkatan kapasitas dan fungsi sarana dan prasarana pengendali banjir
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
- i. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Efektif Dan Efisien, dengan fokus:
 - a. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2. Pengembangan alternatif pembiayaan di luar APBD
 - 3. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
 - 4. Optimalisasi aset-aset kota
 - b. Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal, melalui upaya-upaya:
 - 1. Pengembangan budaya inovasi di OPD
 - 2. Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

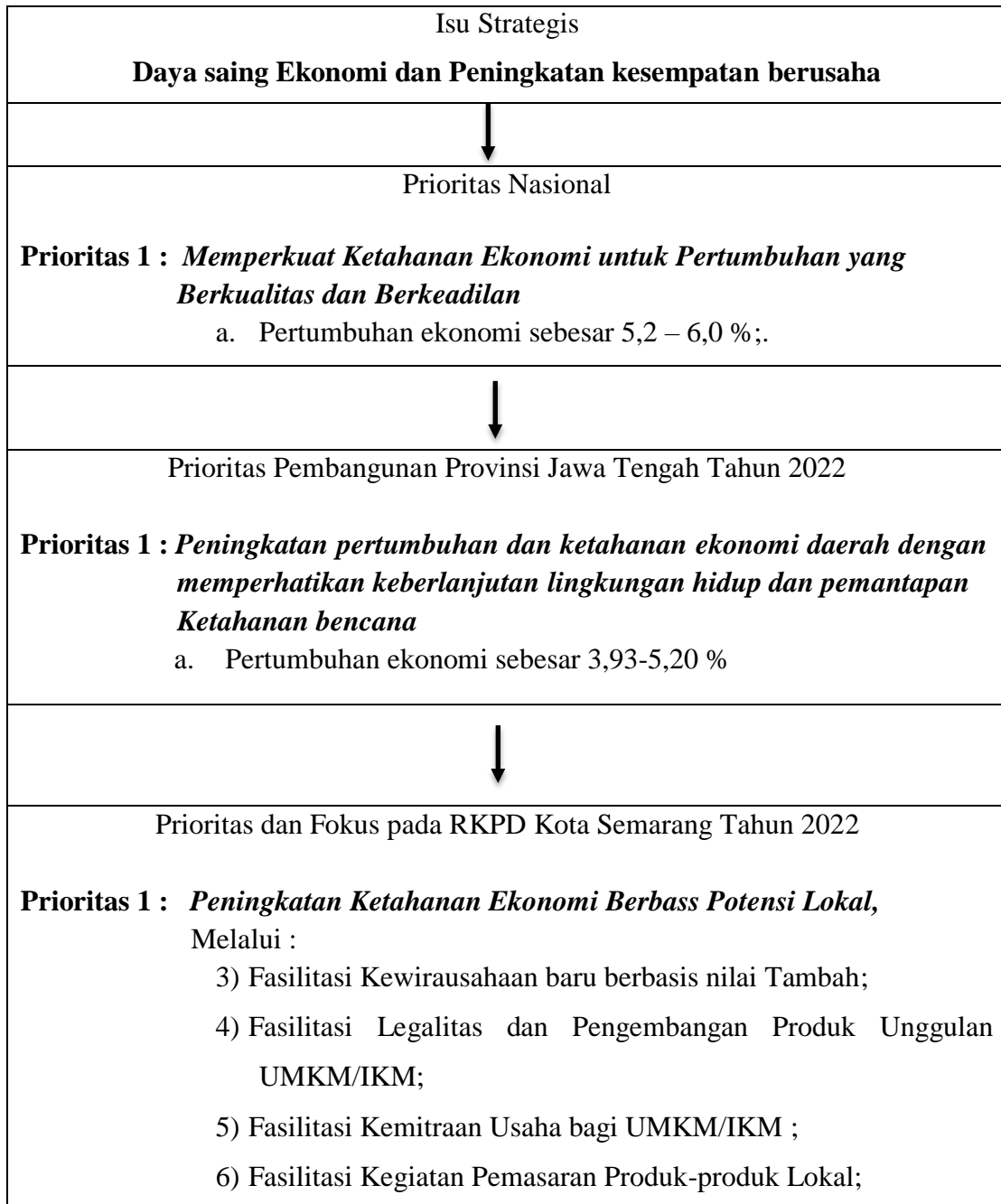
3. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 4. Penguatan Semarang Satu Data
 5. Penguatan Manajemen Risiko
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui upaya-upaya:
1. Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
 3. Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2022, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,50 - 6,00%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60
3. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,70 – 9,00%

Program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas-prioritas tersebut. baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan Program dan Kegiatan OPD dengan Prioritas Pembangunan Nasional maupun Daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Keterkaitan Program dan Kegiatan OPD dengan Isu Strategis, Prioritas
Dearah, Prioritas Propinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional



3.2. Tujuan dan sasaran renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada hakekatnya merupakan penjabaran dalam mendukung pencapaian dari misi ke 2 untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kota Semarang selama kurun waktu 2021 – 2026. sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro

b. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. sebagaimana tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan , kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	76%	76,5%	77%	77,5%	78%
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,2%	77,5%	77,75%	78%	78,5%

2.	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	30%	35%	40%	45%	50%
----	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

3.3. Program dan Kegiatan

a. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana diuraikan diatas. dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. yaitu antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Semarang yang dijabarkan dalam program-program prioritas Walikota Kota Semarang
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis. diantaranya peningkatan SDM pertanian baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**
Kegiatan ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.dan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk

Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan ini diarahkan pada Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha

Mikro (UMKM)

Kegiatan ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

g. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Jumlah program, kegiatan dan ub Kegiatanyang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak *8 (delapan) program* dengan *15 (lima belas) kegiatan*, dan *38 (tiga puluh delapan) Sub kegiatan* yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.5 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
- 1.1.6 Evaluasi kinerja perangkat daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 1.2.2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- 1.2.3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 1.2.4 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.3.1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.3.2 Penyediaan peralatan rumah tangga
- 1.3.3 Penyediaan bahan logistic kantor
- 1.3.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.3.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 1.3.6 Fasilitasi kunjungan tamu
- 1.3.7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

1.3.8 Dukungan pelaksanaan system pemerintah berbasis elektronik pada SKPD

1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1 Pengadaan mabel

1.4.2 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

1.6.2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

1.6.3 Pemeliharaan mabel

1.6.4 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

2.1 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota

2.2 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.2.1 Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Simpan Pinjam

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

3.1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota

3.1.2 Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

4.1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

5.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

6.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

7.1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- 7.1.1 Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro
- 7.1.2 Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
- 7.1.3 Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro
- 7.1.4 Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro

8. Program Pengembangan UMKM

8.1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

- 8.1.1 Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebanyak 8 program. yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin). dan 7 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebanyak 15 kegiatan. yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang. dan 9 kegiatan pelaksanaan / pembangunan.
3. Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebanyak 38 Sub kegiatan. yang terdiri dari 25 Sub kegiatan penunjang. dan 13 Sub kegiatan pelaksanaan / pembangunan
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebesar Rp 25.758.867.000-yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

KODE	SKPD/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA			HASIL KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	Perkiraan N + 1	SKPD/UNIT PELAKSANA
			Uraian	Target	Satuan		Rp.	Rp.	
2.17.0.00.0.00.01.0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						25.758.867.000	19.158.868.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						25.758.867.000	19.158.868.000	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						201.129.570	50.000.000	
			Persentase fasilitasi penerbitan Ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00	Persen				
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						79.929.210	25.000.000	
		Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi Lokal	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15.00	Koperasi	Terlaksananya fasilitasi pemenuhan ijin Usaha Simpan Pinjam 100 persen			
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						79.929.210	25.000.000	
			Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	25.00	Koperasi				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						121.200.360	25.000.000	
		Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi Lokal	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2.00	koperasi	Terlaksananya fasilitasi pemenuhan ijin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam 100 persen			
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						121.200.360	25.000.000	
			Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	25.00	koperasi				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Perkiraan N + 1	SKPD/Unit PELAKSANA
			Uraian	Target	Satuan		Rp.	Rp.	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						331.331.270	120.000.000	
			Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00	Persen				
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						331.331.270	120.000.000	
		Peningkatan nilai tambah potensiekonomi Lokal	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100.00	Koperasi	Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi 100 persen			
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						237.569.460	60.000.000	
			Jumlah Koperasi yang diawasi	250.00	Koperasi				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota						93.761.810	60.000.000	
			Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	120.00	Koperasi				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						152.753.490	50.000.000	
			Persentase Koperasi sehat	30.00	Persen				
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						152.753.490	50.000.000	
		Peningkatan nilai tambah potensiekonomi Lokal	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	66.00	Persen	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi 100 persen			
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						152.753.490	50.000.000	
			Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	200.00	Koperasi				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Perkiraan N + 1	SKPD / Unit PELAKSANA
			Uraian	Target	Satuan		Rp.	Rp.	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						774.094.650	215.000.000	
			Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00	Persen				
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00	Persen				
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						300.685.650	115.000.000	
		Peningkatan nilai tambah potensiekonomi Lokal	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70.00	Persen	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi 100 persen			
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						300.685.650	115.000.000	
			Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	80.00	orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota						473.409.000	100.000.000	
		Peningkatan nilai tambah potensiekonomi Lokal	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	70.00	Persen	Terlaksananya peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha mikro di kota Semarang 100 persen			
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro						473.409.000	100.000.000	
			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan	360.00	orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						1.954.100.700	260.000.000	
			Persentase koperasi yang meningkat Omsetnya	25.00	Persen				
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.954.100.700	260.000.000	
		Peningkatan nilai tambah potensiekonomi Lokal	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50.00	Persen	Terlaksanakannya peningkatan keberdayaan Koperasi melalui Penguatan dan Perlindungan Koperasi, Kemitraan, pengembangan Kelembagaan dan pengembangan Usaha 100 persen			
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						1.954.100.700	260.000.000	
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	340.00	koperasi				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Perkiraan N + 1	SKPD/Unit PELAKSANA
			Uraian	Target	Satuan		Rp.	Rp.	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						6.082.362.060	3.452.652.000	
			Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00	persen				
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						6.082.362.060	3.452.652.000	
		Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi Lokal	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600.00	orang	Terlaksananya peningkatan keberdayaan Pelaku Usaha mikro melalui Pendampingan Usaha, Kemitraan, Pengembangan Kelembagaan dan Akses pembiayaan 100 persen			
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						251.200.000	307.652.000	
			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pendampingan Usaha	500.00	orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro						296.290.760	830.000.000	
			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan usaha	100.00	orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						4.951.012.700	1.995.000.000	
			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan kelembagaan dan usahanya	1250.00	orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro						583.858.600	320.000.000	
			Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan	500.00	orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Perkiraan N + 1	SKPD/Unit PELAKSANA
			Uraian	Target	Satuan		Rp.	Rp.	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						4.841.947.600	1.876.482.000	
			Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00	%				
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						4.841.947.600	1.876.482.000	
		Peningkatan nilai tambah potensiekonomi Lokal	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100.00	orang	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro menjadi usaha kecil 100persen			
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi						4.841.947.600	1.876.482.000	
			Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500.00	orang				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX	NON URUSAN						11.421.147.660	13.134.734.000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.421.147.660	13.134.734.000	
			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	persen				
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100.00	Persen				
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.820.032	6.000.000	
			Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9.00	dokumen	Tersedianya dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Pelaporan KinerjaSKPD 100 persen			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						734.006	1.000.000	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2.00	dokumen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD						3.220.880	1.000.000	
			Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.759.262	1.000.000	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.680.262	1.000.000	
			Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						1.212.662	1.000.000	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	dokumen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.212.960	1.000.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3.00	dokumen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.562.121.764	11.903.734.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Perkiraan N + 1	SKPD/Unit PELAKSANA
			Uraian	Target	Satuan		Rp.	Rp.	
		-	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen	Terpenuhinya administrasi Keuangan dan tersedianya dokumen laporan Keuangan SKPD 100 persen			
		-	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00	Dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.309.257.000	11.651.734.000	
			Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						251.640.000	250.000.000	
			Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	persen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						559.716	1.000.000	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	dokumen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						665.048	1.000.000	
			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00	dokumen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.132.106.507	670.000.000	
		-	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	Tersedianya Sarana dan prasarana Administrasi umum SKPD 100 persen			
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						130.942.330	50.000.000	
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3.00	jenis				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						29.166.000	25.000.000	
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5.00	Jenis				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						79.636.840	75.000.000	
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00	Jenis				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						29.533.337	25.000.000	
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8.00	Jenis				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.920.000	5.000.000	

			Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2.00	Jenis				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu						81.000.000	50.000.000	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Perkiraan N + 1	SKPD/Unit PELAKSANA
			Uraian	Target	Sasaran				
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah tamu yang berkunjung	1800.00	orang		442.410.000	240.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100.00	kegiatan				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						337.498.000	200.000.000	
			Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	jenis				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						244.949.010	50.000.000	
		-	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor 100 persen			
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						108.913.710	25.000.000	
			Jumlah Mebel yang disediakan	3.00	jenis				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						136.035.300	25.000.000	
			Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2.00	jenis				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						116.640.000	125.000.000	
		-	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	Tersedianya jasa Penunjang Perkantoran 100 persen			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						116.640.000	125.000.000	
			Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	persen				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						353.510.347	380.000.000	
		-	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persen	Tersedianya Sarana dan prasarana penunjang yang dapat digunakan 100persen			
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.318.180	40.000.000	
			Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1.00	unit				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						226.772.550	260.000.000	

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25.00	unit				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel						2.181.600	10.000.000	
			Jumlah Pemeliharaan Mebel	2.00	jenis				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						88.238.017	70.000.000	
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.00	Jenis				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB V PENUTUP

Rencana kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan tahun 2022 mengikuti prinsip *money follows program* dengan orientasi pada pendekatan Tematik. Holistik. Integratif dan Spasial. Penyusunan RENJA tahun 2022 juga dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengambil tema **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Sistem Kesehatan menuju Masyarakat Sejahtera”**. diharapkan kualitas kesehatan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat meningkat dan segera pulih setelah terkena dampak pandemi Covid-19.

RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. program/kegiatan/sub kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Semarang Kota Semarang Tahun Anggaran 2022

Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026;

2. Penyusunan Renja Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026. dimana tahun 2022 merupakan tahun Pertama dari pelaksanaan Renstra. dengan mengacu pada nomenklatur program. kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
3. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022. dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 untuk setiap triwulannya;

2. Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

Semarang, 23 Juli 2021

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang



BAMBANG SURANGGONO. S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19660427 198603 1 005

LAMPIRAN
PEMETAAN NOMENKLATUR
PROGRAM. KEGIATAN. DAN SUB KEGIATAN
SESUAI DENGAN PERMENDAGRI **NOMOR 90 TAHUN 2019**

LAMPIRAN

V.1.1 PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

V.1.2 SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

V.1.3 PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

V.1.4 KOTA SEMARANG TAHUN 2021

PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR APBD TAHUN2021		URUSAN. BIDANG URUSAN. PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
00.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
0.00.01.002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI. SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK			
	Pembayaran rekening telepon dan listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	
0.00.01.006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL			
	Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
0.00.01.010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR			
	Penyediaan alat tulis kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
0.00.01.011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN			
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
0.00.01.014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA			
	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
0.00.01.015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
0.00.01.017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN			
	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	

0.00.01.018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH			
	Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
0.00.01.028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH			
	Pelaksanaan penugasan dinas kedalam daerah			Sesuai. Masuk pada Rincian Belanja sub kegiatan
0.00.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran			
	Pemenuhan kebutuhan lembur dll. bagi Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
00.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
0.00.02.007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
0.00.02.009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR			
	Pengadaan peralatan gedung kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
0.00.02.024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL			
	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
0.00.02.026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR			
	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	
0.00.02.028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR			
	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	

00.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
0.00.06.005	PENUNJANG KINERJA PA. PPK. BENDAHARA DAN PEMBANTU			
	Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
		X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
0.00.06.006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD			
	LKPJ SKPD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	
0.00.06.010	PENYUSUNAN LAKIP			
	Lakip SKPD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	
0.00.06.020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN			
	Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
		X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	
0.00.06.022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN			
	Laporan keuangan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
		X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	
0.00.06.028	PENYUSUNAN RENJA SKPD			
	Renja SKPD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
0.00.06.029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD			
	Renstra SKPD			
0.00.06.030	PENYUSUNAN RKA DAN DPA			
	RKA dan DPA, DPPA SKPD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	

1.15.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH			
1.15.00.16.021	PENGUATAN MUTU PRODUK USAHA MIKRO			
	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi	
1.15.00.16.022	PENDAMPINGAN USAHA MIKRO			
	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dalam mengembangkan usaha	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
1.15.00.16.023	PENINGKATAN MANAJEMEN USAHA MIKRO			
	Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
1.15.00.16.024	PENINGKATAN PEMBINAAN PRODUK USAHA MIKRO UNGGULAN DAERAH			
	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
1.15.00.16.025	PENINGKATAN KAPASITAS KEWIRAUSAHAAN			
	Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
01.15.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KUMKM			
1.15.17.014	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro			
	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pengembangan usahanya	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan

		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
1.15.00.17.029	FASILITASI AKSES PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO			
	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
1.15.00.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI			
1.15.00.18.016	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI			
	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	

1.15.00.18.017	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGAWASAN KOPERASI			
	Pengawas koperasi yang ditingkatkan manajemen pengawasan koperasi		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
1.15.00.18.018	PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI			
	Koperasi yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.18.019	PENINGKATAN PENGENDALIAN KOPERASI			
	Koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

		2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan. Kesehatan. Kemandirian. Ketangguhan. serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
1.15.00.18.021	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI			
	KSP/USP yang dinilai kesehatannya		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
1.15.00.18.022	FASILITASI HARI KOPERASI			
	Terselenggaranya peringatan hari koperasi beserta rangkaiannya		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.18.023	FASILITASI KELEMBAGAAN KOPERASI			
	Koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.18.024	PEMASYARAKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI			
	Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkoperasian	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.18.026	ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN KOPERASI			
	Koperasi yang mendapat fasilitasi pendirian. perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.18.027	FASILITASI PERIJINAN KOPERASI			
	Koperasi yang mendapat fasilitasi perijinan koperasi	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	

		02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1.15.00.18.028	FASILITASI INFORMASI KOPERASI			
	Pengembangan data dan informasi koperasi	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.18.029	PENINGKATAN KEPATUHAN KOPERASI			
	Koperasi yang ditingkatkan akuntabilitas. kepercayaan. kepatuhan. kesinambungan	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

1.15.00.18.030	PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
	Koperasi yg mendapat pembinaan dalam penguatan dan perlindungan koperasi	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Keg
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.21	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM			
1.15.00.21.002	PENINGKATAN PERLUASAN JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN UMKM			
	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan jaringan dan kemitraan usaha	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
1.15.00.21.005	FASILITASI PROMOSI PRODUK UMKM			
	UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	

		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi	
1.15.00.21.006	PERLUASAN AKSES PASAR			
	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai. Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	
		02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi	